

MANAJEMEN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH

Irman Puansah

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: This research is based on the development of tourism in South Tapanuli Regency which still get less attention from Local Government, tourism development policies are not prioritized in the middle of tourism potential in South Tapanuli Regency is very promising and the tourists interest is also quite high. Apart from that part of society including managers and communities who expect the impact of tourism development quite a lot, which is expected to improve the welfare of the community. This research uses qualitative research methods, data collection method is done by interview and observation through field research. The results showed that (i) Tourism development in South Tapanuli region has not been maximized by South Tapanuli Regency Government. Local governments have not been able to conceptualize tourism development. Tourism has not become a priority scale of the South Tapanuli regency. Lack of policy from the local government resulted in the development of tourism does not develop maximally. (ii) obstacles faced in tourism development in South Tapanuli namely, lack of human resources in tourism, inability of local executives in utilizing their power for tourism development, financing of tourism development is still minimal.

Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengembangan pariwisata di Kabupaten Tapanuli Selatan yang masih kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah, kebijakan-kebijakan pengembangan pariwisata tidak diprioritaskan di tengah-tengah potensi pariwisata di Kabupaten Tapanuli Selatan sangat menjanjikan dan minat wisatawan juga cukup tinggi. Selain dari pada itu sebahagian masyarakat termasuk pengelola dan masyarakat yang mengharapkan dampak dari pengembangan pariwisata cukup banyak, yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi melalui penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) Pengembangan pariwisata di Daerah Tapanuli Selatan belum dimaksimalkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemerintah daerah belum mampu membuat konsep pengembangan pariwisata. Pariwisata belum menjadi skala prioritas daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Kurangnya kebijakan dari pemerintah daerah mengakibatkan pengembangan pariwisata tidak berkembang secara maksimal. (ii) Hambatan yang dihadapi dalam Pengembangan Pariwisata Di Tapanuli Selatan dengan yaitu, Kurangnya SDM di bidang Pariwisata, Ketidak mampuan eksekutif daerah dalam memanfaatkan kekuasaannya untuk pengembangan pariwisata, Pembiayaan terhadap pengembangan pariwisata masih minim.

Kata Kunci: manajemen, pengembangan pariwisata, pemerintah daerah

PENDAHULUAN

Pengembangan pariwisata Indonesia telah tercermin dalam rencana strategi yang dirumuskan oleh kementerian kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia yakni: (1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta pemerataan pembangunan dibidang pariwisata; (2) mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkesinambungan sehingga memberikan manfaat sosial-budaya, sosial ekonomi bagi masyarakat dan daerah, serta terpeliharanya mutu lingkungan hidup; (3) meningkatkan kepuasan wisatawan dan memperluas pansa pasar; dan (4) menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan pariwisata Indonesia sebagai berdaya

guna, produktif, transparan dan bebas KKN untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, dalam institusi yang merupakan amanah yang dipertanggung jawabkan (*accountable*).

Dasar hukum pengembangan pariwisata yang sesuai dengan prinsip pengembangan adalah Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, tentang pembangunan kepariwisataan pasal (6) pengembangan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata, pasal (8) :1) pembangunan kepariwisataan

dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan propinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten/Kota. 2) pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Pasal (11) : pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pembangunan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan. serta UU No 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata, mengenai kawasan strategis pasal (12:ayat 1) aspek-aspek penetapan kawasan strategis pariwisata.

Dengan semangat otonomi daerah yang pada dasarnya memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus setiap kepentingan masyarakat setempat, maka dalam rangka percepatan proses pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Pemerintah Daerah harus benar-benar menangkap pelimpahan tugas dan wewenang itu sebagai salah satu peluang yang menjadi andalan untuk memperoleh PAD dan memajukan masyarakat di daerah. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan daerah dan mempunyai peranan cukup penting dalam perekonomian baik sebagai sumber devisa atau pendapatan.

Pembangunan kepariwisataan pada hakekatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan obyek dan daya tarik wisata yang terwujud antara lain dalam bentuk kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan seni budaya, dan peninggalan purbakala. Dengan latar belakang potensi wisata yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan yang belum seluruhnya dikelola secara profesional oleh pemerintah daerah, maka peranan pemerintah sebagai fasilitator sangat strategis dalam mewujudkan upaya-upaya ke arah pengembangan pariwisata tersebut melalui kepemimpinan institusinya bertanggung jawab atas empat hal utama yaitu; perencanaan (*planning*) daerah atau kawasan pariwisata, pembangunan (*development*) fasilitas utama dan pendukung pariwisata, pengeluaran kebijakan (*policy*) pa-

riwisata, dan pembuatan dan penegakan peraturan (*regulation*). Maka untuk itu pariwisata di daerah Tapanuli Selatan ini perlu mendapat perhatian lebih mendalam khususnya aset-aset wisata yang memiliki potensi wisata yang bukan saja bernilai historis melainkan aset wisata yang berpotensi ekonomis. Dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja, maka industri pariwisata dijadikan salah satu sektor andalan dimana pariwisata dianggap sebagai salah satu industri yang menimbulkan efek ganda bagi sektor lainnya.

Aspek lain yang tak kalah penting dalam mendorong pengembangan pariwisata adalah kesiapan daerah dalam mengelola dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Sesuai kondisi Kabupaten Tapanuli Selatan saat ini dengan luas 4.367.05 km² memiliki potensi obyek wisata yang menarik untuk dikembangkan, seperti wisata alam. Wisata alam Kabupaten Tapanuli Selatan mendominasi obyek wisata lain seperti obyek wisata sejarah, wisata budaya, wisata seni. Potensi obyek pariwisata alam kabupaten Tapanuli Selatan yang paling berpotensi antara lain, Danau siais, Air terju si Lima-lima, Aek Sijorni, dll.

Sejalan dengan hal tersebut Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011-2015 Yang menjadi salah satu potensi pengembangan wilayah adalah sektor pariwisata baik wisata budaya maupun wisata alam. Yang termasuk Danau Siais, Kawasan pesisir pantai Muara Opu, Kawasan Air terjun Aek Sijorni, dan lain sebagainya. Dengan demikian dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tapanuli Selatan daerah tersebut akan dikembangkan.

Apabila potensi pariwisata tersebut dikelola secara profesional dan maksimal maka akan memberikan dampak antara lain

1. meningkatkan pendapatan bagi anggota masyarakat
2. Pengembangan sektor pariwisata dapat menjadi sumber penerimaan pendapatan daerah.
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat memperoleh manfaat yang besar bagi kegiatan pariwisata.

4. Terwujudnya masyarakat sadar untuk berwisata karena tidak terlalu jauh untuk ditempuh bagi masyarakat sekitar dan daerah kabupaten lain. Dan bagi masyarakat setempat mendukung dan menunjang semakin berkembangnya usaha dan kegiatan kepariwisataan.
5. Menambah lapangan pekerjaan.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006-2025. Arah pembangunan Pariwisata tahap kedua (tahun 2011-2015), menyebutkan:

1. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan data base tentang kondisi dan potensi pariwisata yang terbesar di daerah berbasis komputerisasi dengan pelayanan data dan informasi tidak hanya sebatas lingkungan daerah akan tetapi dapat menjangkau secara global.
2. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan rencana induk pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata yang ada di daerah berbasis komputerisasi dengan pelayanan data dan informasi tidak hanya sebatas lingkungan daerah akan tetapi dapat menjangkau secara global
3. Membangun dan mengembangkan potensi hutan-hutan lindung daerah menjadi kawasan pariwisata bersiat lindung seperti taman safari, taman nasional, taman buru dalam bentuk taman wisata lain tanpa merusak kelestarian fungsi lindung kawasan hutan lindung dimaksud.
4. Mengintensifkan pelaksanaan promosi melalui berbagai media cetak dan elektronik tentang kondisi dan potensi pariwisata di daerah dengan teknologi informasi dan data berbasis komputerisasi on line secara global.
5. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat sadar wisata pada setiap sentra-sentra pengembangan potensi pariwisata.
6. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan Daerah tentang pedoman standar pengelolaan dan pengembangan pariwisata di daerah dengan pola pemberdayaan masyarakat saling menguntungkan dan berwawasan lingkungan.

Dalam rencana pembangunan jangka me-

nengah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2011-2015 yang menjadi sasaran bidang pariwisata adalah meningkatnya aksesibilitas pada obyek wisata, meningkatnya kunjungan wisatawan, terpeliharanya lingkungan dan keindahan obyek wisata, serta tersedianya fasilitas obyek wisata.

Manajemen pemerintah untuk mengembangkan pariwisata belum serius hal tersebut bisa dilihat selama lima tahun terakhir hal yang dilakukan adalah hal yang sama dan hasil program tersebut juga belum jelas. Berdasarkan hal tersebut diatas persoalan-persolan yang dihadapi selama lima tahun yang mengakibatkan tidak tergalinya serta ketidak mapuan sektor pariwisata untuk berkembang yaitu : Keterbatasan SDM Birokrat yang ada di Dinas Pariwisata Tapanuli Selatan; Duta pariwisata yang telah dibentuk oleh Dinas Pariwisata tidak dimaksimalkan; dan Keterbatasan Dana yang ada bagi sektor pariwisata, hal ini bisa dilihat dari banyaknya potensi pariwisata Kabupaten Tapanuli Selatan tidak seimbang dengan dana yang diberikan pada sektor ini.

METODE

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dimana menurut Afrizal dalam Sugiyono (2009) bahwa metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan *deskriptif-analitis*, dimana peneliti mengembangkan konsep dan menganalisis fakta yang ada. Menurut Nawawi dalam Idrus (2009), metode deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek pada saat sekarang dan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya.

Adapun teknik yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah: 1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*). Meliputi pandangan-pandangan, persepsi, dan harapan-harapan setiap pihak mengenai pengelolaan potensi pariwisata di Kabupaten Tapanuli Selatan Khususnya Danau

Siais dan Aek Sijorni. 2. Observasi melalui penelitian lapangan, pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. 3. Studi Dokumentasi. Sumber-sumber data yang digunakan, antara lain: penelusuran kepustakaan seperti perundang-undangan, dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan pariwisata bertujuan memberikan keuntungan baik bagi wisatawan maupun warga setempat. Basis pengembangan pariwisata adalah potensi sumber daya keragaman budaya, seni, dan alam (pesona alam). Pengembangan sumber daya tersebut dikelola melalui pendekatan peningkatan nilai tambah sumber daya secara terpadu antara pengembangan produk pariwisata dan pengembangan pemasaran pariwisata melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal dalam rangka pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata.

Dalam pengembangan pariwisata sangat dibutuhkan perencanaan yang matang agar dapat memberikan dampak yang baik bagi pemerintah, dalam hal ini mampu memberikan sumbangan bagi pendapatan asli daerah dari sektor tersebut. Karena dalam perencanaan pengembangan pariwisata tidak terlepas dari segala aspek yang berhubungan dengan pariwisata itu sendiri antara lain, kalangan pemerintah, para pelaku usaha pariwisata dan masyarakat umum. Diperencanaan akan dirumuskan kemana arah pariwisata dikembangkan, dan bagaimana pelaksanaannya. Untuk itu diperlukan proses perencanaan yang baik agar segala aspek yang menjadi tujuan dapat terrealisasi.

Menurut Kurniawan dalam perencanaan pembangunan pariwisata memerlukan berbagai proses tahapan-tahapan seperti yang telah dikemukakan yaitu diantaranya adalah :

1. Persiapan study, adalah awalan bagi badan

perencana di bawah pemerintahan daerah memutuskan atau melakukan study dan menyusun acuan kerja atau organisasi.

2. Penentuan sasaran, merumuskan maksud pokok memrakarsai study, misalnya untuk menunjang pengembangan pariwisata kota dalam rangka meraih manfaat ekonomi (yang terukur) dan lingkungan kota serta manfaat bagi penduduk kota melalui menciptakan lapangan kerja dan memperluas pelayanan bagi penduduk maupun wisatawan.
3. Segi semua elemen, menghimpun ragam sumberdaya pariwisata dan perkembangan daerah maupun ekonomi kepariwisataan. Untuk itu perlu dikumpulkan data perihal kebutuhan pariwisata kota (misalnya : karakteristik wisatawan, pola perjalanana, dan kecenderungannya) dan ketersediaan sumber daya kepariwisataan (misalnya : daya tarik, akomodasi, fasilitas, prasarana, struktur ekonomi pariwisata, dan lingkungan) serta penilaian kemungkinan tentang penanaman modal bagi perkembangan dimasa depan.
4. Analisis dan sintesis temuan temuan, mengacu pada proses analisis informasi yang diperoleh dari hasil penyigian sebagai dasar perumusan rencana.
5. Rumusan kebijakan dan rencana, menyusun draft rencana pengembangan berdasarkan pilihan kebijakan pariwisata.
6. Dasar pertimbangan usulan, adalah tahap perencanaan seluruhnya diajukan kepada komisi perencanaan pemerintah daerah untuk dikaji dan memperoleh masukan. Diskusi berlangsung antara penyusun rencana dan komisi perencanaan pemerintah dapat juga dilakukan konsultasi kepada pihak-pihak lain yang mempunyai perhatian.
7. Pelaksanaan dan pemantauan rencana, tahap rencana diwujudkan dalam tindakan, kegagalan baru disadari saat proses berjalan maka dari itu perlu diadakan pemantauan.
8. Tinjauan berkala, mengacu pada proses pelaporan balik atas kemajuan rencana dan tahap study persiapan.

Dalam pengembangan pariwisata di Tapanuli Selatan dalam proses perencanaan masih jauh seperti yang telah dikemukakan di atas, hal

ini dapat dilihat bahwa hingga saat ini rencana induk pembangunan pariwisata daerah (RIPPDA) belum dibuat oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dan perumusan mengenai RIPPDA tersebut belum dirumuskan hingga tahun 2017. RIPPDA baru akan dirumuskan pada tahun 2018. Dengan demikian tahapan study mengenai pengembangan pariwisata baru akan dimulai pada tahun 2018 juga.

Melihat hal tersebut, nampaknya pengembangan pariwisata di Tapanuli Selatan belum memiliki konsep yang jelas sehingga belum dapat dirumuskan dan belum dapat dilakukan kajian studinya. Karena pembangunan pariwisata diperlukan konsep dan strategi yang jelas terutama di level perencanaan makro dan mikro. Dalam Undang—Undang no 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata pada pasal 8 perencanaan pengembangan kepariwisataan dapat diatur melalui rencana induk pembangunan kepariwisataan. Dalam pasal 8 tersebut dijelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Artinya, ada keterkaitan antara UU no 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dengan rencana induk pengembangan kepariwisataan di tingkatan provinsi ataupun kabupaten/kota.

Melihat perencanaan pariwisata yang belum dirumuskan dengan baik dan belum memiliki konsep yang benar, sepertinya pariwisata belum merupakan urusan yang diprioritaskan. Karena Dinas Pariwisata baru berdiri sendiri di awal tahun di awal tahun 2017. Sebelumnya Dinas Pariwisata masih merupakan bagian dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, hal ini mengakibatkan urusan pariwisata belum menjadi urusan yang diprioritaskan, sehingga sulit untuk berkembang. Hal tersebut selaras jika memperhatikan program-program yang dijalankan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata pada tahun 2016 dari 40 program yang dijalankan bidang pemuda olah raga memiliki tujuh belas program sedangkan bidang pariwisata hanya 4 program yang antara lain adalah:

1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata.
2. Pengembangan daerah tujuan wisata.
3. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.
4. Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata.

Dengan melihat program yang dijalankan di tahun 2016 terlihat bahwa tahapan serta proses perencanaan pariwisata mulai dari persiapan study hingga tinjauan berkala terhadap pariwisata belum dijalankan. Bahkan pemerintah daerah hingga sekarang belum memiliki RIPPDA dan perencanaan pariwisata belum mencakup seluruh jaringan seperti para pelaku usaha dan masyarakat umum. Perencanaan kepariwisataan harus mencakup seluruh jaringan yang antara lain: Kalgan pemerintah (vertikal horizontal) Para pelaku usaha pariwisata, Masyarakat Umum.

Dari arah pembangunan Pariwisata tahun 2011-2015 dapat diketahui hanya pada poin ke 4 yang berjalan dan itu juga hanya pada pelaksanaan promosi melalui media cetak. Dan dari program kerja tahunan yang berada pada dinas pariwisata seperti tercantum pada pendahuluan, cukup jauh dengan perencanaan yang terdapat pada rencana pembangunan jangka menengah tahun 2011-2015. Program yang terdapat pada dinas pariwisata yaitu program promosi pariwisata dan perbaikan fasilitas-fasilitas objek wisata. Namun tidak terdapat RIPPDA yang sudah selesai dan juga peraturan daerah tentang pariwisata. dengan demikian kesesuaian antara rencana pembangunan jangka menengah pembangunan daerah kabupaten Tapanuli Selatan dengan program tahunan yang berada pada dinas pariwisata masih cukup jauh.

Hambatan dalam Pengembangan Pariwisata

Dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Tapanuli Selatan seperti telah dibahas pada halaman sebelumnya, yang pada pengaplikasiannya tentu tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan, pada pengembangannya tentu mendapat hambatan dari berbagai aspek. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Tapanuli Selatan, yang

hambatan tersebut dapat ditemui mulai dari perencanaan, antara lain:

1. Pendanaan

Dalam manajemen pengembangan pariwisata pendanaan merupakan aspek yang sangat vital perannya, karena tanpa dana yang cukup maka akan sulit bagi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan pariwisata. Kabupaten Tapanuli Selatan untuk bidang pariwisata pada tahun 2014 total anggaran yang didapatkan hanya Rp. 165.641.500,-, pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp.236.220.000,- dan pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 522.153.000,-. Maka wajar saja jika pembangunan yang dilakukan hanya pada kisaran perbaikan fasilitas dan promosi saja.

2. Kurangnya Kemampuan SDM

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata, dengan kemampuan sumber daya manusia yang cukup maka akan memberikan peluang kemudahan dalam pengembangannya. Kemampuan sumber daya manusia yang dimaksud adalah, Pemerintah Daerah, Dinas Pariwisata dan juga masyarakat sekitar.

Kebijakan-kebijakan yang mendukung dalam pengembangan pariwisata sangat dibutuhkan agar pengembangan pariwisata tersebut dapat berkembang secara baik dan benar. Kurangnya kebijakan merupakan salah satu faktor yang menjadikan pariwisata di Kabupaten Tapanuli Selatan perkembangannya tersendat.

SIMPULAN

Pengembangan pariwisata di Tapanuli Selatan belum dimaksimalkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemerintah daerah belum mampu membuat konsep pengembangan pariwisata. Pariwisata belum menjadi skala prioritas daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Kurangnya kebijakan dari pemerintah

daerah mengakibatkan pengembangan pariwisata tidak berkembang secara maksimal. Hambatan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata, yaitu kurangnya SDM di bidang Pariwisata, ketidakmampuan eksekutif daerah dalam memanfaatkan kekuasaannya untuk pengembangan pariwisata, dan pembiayaan terhadap pengembangan pariwisata masih minim.

DAFTAR RUJUKAN

- Antariksa, Basuki. 2016. *Kebijakan Pembangunan Kepariwisataaan*. Intrans Publishing.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2003. *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Idrus, Muhammad, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mudrajad, 2006. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga
- Pitana, I Gde, dan I Ketut Surya Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: ANDI
- Sudjana D. 2000. *Manajemen Program Pendidikan*. Bandung: Falah Production
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta : Andi Ofset
- Sammeng, Andi Mappi. 2001. *Cakrawala Pariwisata*. Jakarta: Balai Pustaka
- Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan*. Tangerang: Cv. Media Brilian.
- Swarbrooke, Jhon. 1996. *Depeloment and Management of Visitor Attrations*. Oxford : Butterworth-Heinemenn
- Wahab, Salah. 2003. *Manajemen Kepariwisataaan*. Jakarta : PT Pradnya Paramita
- Yoeti, Oka, A. 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta, Pradaya Pratama.